



Diskominfo
KOTABANDUNG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Tahun 2024



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024 merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2024 dan memberikan gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat struktural maupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, kewenangan dan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Daerah tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kami berusaha dan berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kami menyadari belum dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, oleh karena itu dengan tangan terbuka kami mengharapkan semua masukan serta saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua pihak yang berkepentingan khususnya bagi para pimpinan unit kerja lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan umumnya seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Bandung, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



(YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos.M.Si)
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197311271993031003

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	2
Daftar Gambar	3
Daftar Tabel	6
BAB I PENDAHULUAN	9
a. Gambaran Umum Organisasi.....	9
b. Tugas dan Fungsi	10
c. Isu Strategis yang dihadapi	16
d. Dasar Hukum	18
e. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024.....	20
a. Perencanaan Strategi.....	20
b. Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
c. Perjanjian Kinerja (PK)	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024.....	33
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	33
1. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	34
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	36
b. Perbandingan Realisasi kinerja dengan Tahun Sebelumnya	37
c. Realisasi kinerja dengan Akhir Tahun Berjalan	38
d. Realisasi Kinerja dengan standar nasional.....	40
e. Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	40
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	43
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	45
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.....	57
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	59

b. Perbandingan Realisasi kinerja dengan Tahun Sebelumnya	61
c. Realisasi kinerja dengan Akhir Tahun Berjalan	61
d. Realisasi Kinerja dengan standar nasional.....	62
e. Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	62
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	63
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	64
B. Realisasi Anggaran	68
 BAB IV PENUTUP	 85

Daftar Gambar

Gambar 1. Organigram Diskominfo Kota Bandung	13
Gambar 2 Grafik Eselonering Pegawai Diskominfo	14
Gambar 3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pangkat	15
Gambar 4 . Grafik Berdasarkan Pendidikan.....	16
Gambar 5. Akumulasi persentase target Renstra 2024-2026	26
Gambar 6 Index SPBE 2024 Tigkat Kota, provinsi, dan kabupaten.....	39
Gambar 7 Laporan Hasil Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM).....	60

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	12
Tabel 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan Pangkat	13
Tabel 3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	14
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Diskominfo dalam rangka pencapaian visi dan misi RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 sebelum perubahan	22
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Diskominfo dalam rangka pencapaian visi dan misi RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 setelah perubahan	23
Tabel 2.3 Target tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kota Bandung Tahun 2024-2026 sebelum perubahan	24
Tabel 2.4 Target tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kota Bandung tahun 2018-2023 setelah perubahan	25
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Sebelum Perubahan	28
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Setelah Perubahan	29
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Sebelum Perubahan	30
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Setelah Perubahan	31

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	33
Tabel 3.2 Analisis pencapaian sasaran Tahun 2024 SPBE	35
Tabel 3.3 TINGKAT AKUNTABILITAS KEUANGAN	44
TABEL 3.4 Capaian Program Tahun 2024	45
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Kigeiatan Sasaran 1 Diskominfo Tahun 2024	54
Tabel 3.6 Analisis pencapaian sasaran Tahun 2024 IKM	57
Tabel 3.7 TINGKAT AKUNTABILITAS KEUANGAN	64
TABEL 3.8 Capaian Program Tahun 2024	65
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Sasaran 2 Diskominfo Tahun 2024	66
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024	68
Tabel 3.11 PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2024	73

TABEL 3.12 PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA, TAHUN 2023, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2024	74
TABEL 3.13 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2024-2026	75
TABEL 3.14 PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2024-2026	75



BAB I

PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang

tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun LKIP. Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik .

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan lingkup Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik;
2. Pelaksanakan kebijakan lingkup, Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup komunikasi dan informatika, Persandian dan statistik;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup komunikasi dan informatika, persandian dan statistik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

Sekretaris, membawahi:

1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Keuangan
3. Kelompok Substansi program

Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi :

1. Kelompok Substansi Perencanaan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Kelompok Subtansi Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunkasi;
3. Kelompok Subtansi Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bidang Infrastruktur TIK membawahi:

1. Kelompok Subtansi Interkoneksi dan Jaringan;
2. Kelompok Subtansi Manajemen Perangkat keras TIK
3. Kelompok Subtansi Infrastruktur TIK untuk Publik

Bidang Diseminasi Informasi

1. Kelompok Subtansi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi
2. Kelompok Subtansi Keterbukaan Informasi Publik
3. Kelompok Subtansi Kemitraan Informasi Masyarakat

Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi membawahi:

1. Kelompok Subtansi Pengelolaan Aplikasi;
2. Kelompok Subtansi Integrasi Sistem Informasi; dan
3. Kelompok Subtansi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi

Bidang Data dan Statistik, membawahi:

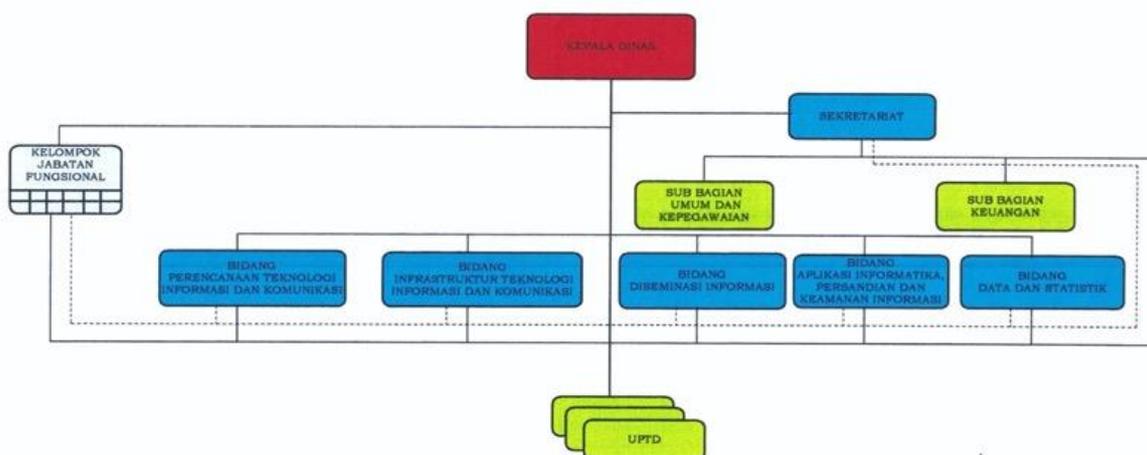
1. Kelompok Subtansi Survey dan Akuisisi Data;
2. Kelompok Subtansi Pengolahan dan Analisa Data;
3. Kelompok Subtansi Publikasi dan Data Terbuka

UPT Radio Sonata

Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG



Gambar 1. Organigram Diskominfo Kota Bandung

Kepegawaian

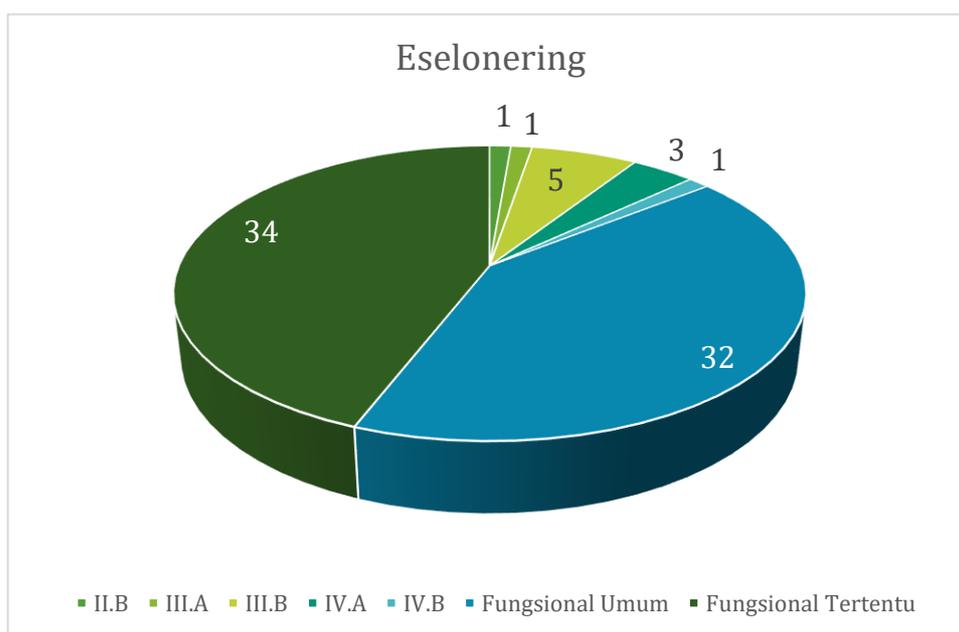
Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 77 orang dengan 69 orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dari jumlah pegawai sebanyak 77 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 5 orang, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 3 orang dan Ka Bagian Tata Usaha UPT (Eselon VI b) sebanyak 1 orang, fungsional umum 32 orang serta fungsional tertentu sebanyak 34 orang.



TABEL 1. KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN

Eselon	Jumlah	Persentase
II.b	1	1%
III.a	1	1%
III.b	5	7%
IV.a	3	4%
IV.b	1	1%
Fungsional Umum	32	42%
Fungsional Tertentu	34	44%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



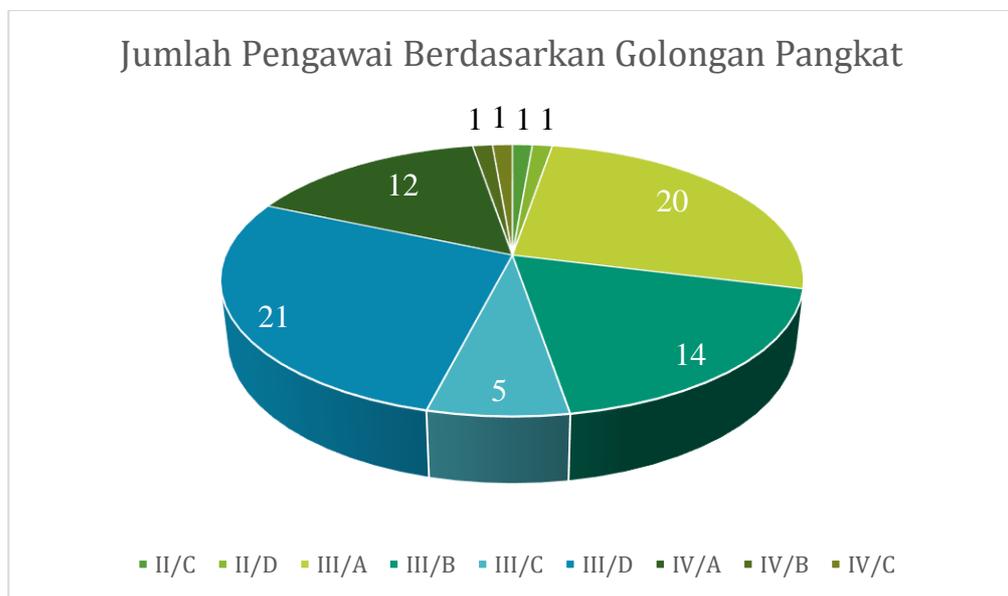
GAMBAR 2 GRAFIK ESELONERING PEGAWAI DISKOMINFO

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan golongan pangkat, dapat di lihat Tabel 2.

TABEL 2 KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN GOLONGAN PANGKAT

Golongan Pangkat	Jumlah	Persentase
II/C	1	1%
II/D	1	1%
III/A	20	26%
III/B	14	19%
III/C	5	7%
III/D	21	28%
IV/A	12	16%
IV/B	1	1%
IV/C	1	1%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



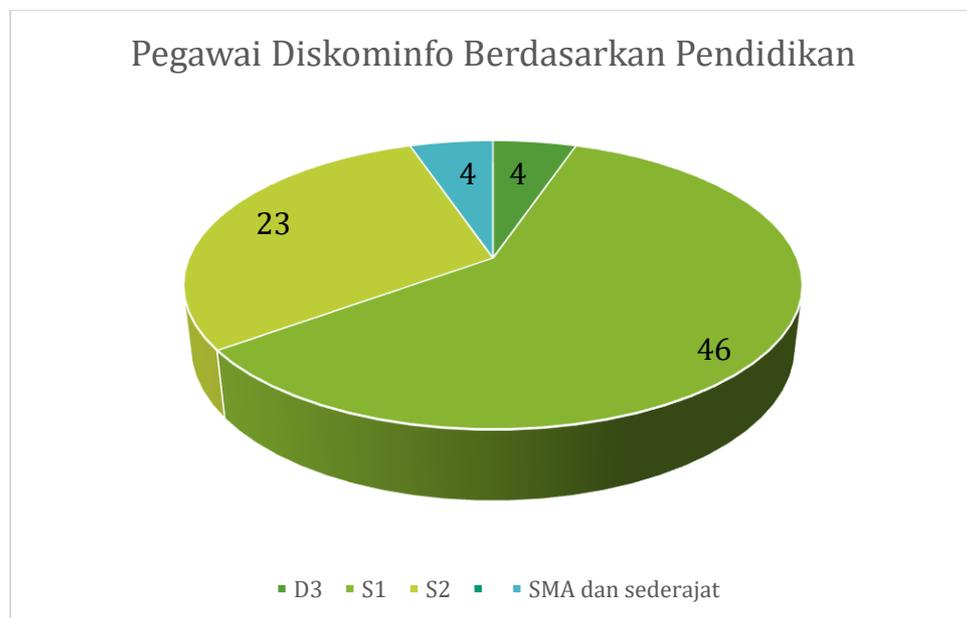
GAMBAR 3 GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN PANGKAT

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, dapat di lihat Tabel 3.

TABEL 3. KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

Pendidikan Akhir	Jumlah	Persentase
SLTA	4	5%
D3	4	5%
S1	46	60%
S2	23	30%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



GAMBAR 4 . GRAFIK BERDASARKAN PENDIDIKAN

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 23 orang (30%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 46 orang (60%), yang memiliki D3 sebanyak 4 orang (5%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 4 orang (5%),

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Diskominfo Kota Bandung untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/ bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Diskominfo Kota Bandung.

c. Isu Strategis yang Dihadapi

Pemerintah daerah dituntut untuk tanggap terhadap akan kebutuhan warganya. Oleh karena itu sebagai Dinas yang membawahi urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik, Diskominfo Kota Bandung dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Beberapa isu sudah dirumuskan di dalam Renstra 2024-2026, namun seiring perjalanan dan perkembangan, terutama teknologi media digital, isu-isu ini berkembang dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan warga Kota Bandung. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:



d. Dasar Hukum

Dasar Hukum

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah :

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika



e. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Yaitu;

<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	Meliputi; Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika
<i>BAB II PERENCANAAN KINERJA</i>	Meliputi Perencanaan Strategis (sebelum dan setelah review), IKU dan Perjanjian Kinerja.
<i>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</i>	Meliputi; Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
<i>BAB IV PENUTUP</i>	Kesimpulan dan Rekomendasi

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, Diskominfo Kota Bandung menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja subag program di Diskominfo sebagai acuan. Dalam SOP ini tergambarakan pihak-pihak yang terlibat, alur kerja serta data yang mengalir dan dipertukarkan. SOP ini akan di review kemudian sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja Dinas.

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
	Kepala Diskominfo	Sekretaris Diskominfo	Sub Koordinator Program	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
Mengumpulkan data kinerja dari setiap bidang dan UPT			●	Data	30	Data	
Mengumpulkan informasi data-data kinerja untuk melengkapi laporan			□	Data	30	Data	
Mengolah Data Kinerja yang sudah terkumpul			□	Dokumen	120	Dokumen	
Membuat Draft Laporan Kinerja			□	Dokumen	90	Dokumen	
Melapor kepada Atasan	No	□		Laporan	15	Laporan	
Menganalisa Laporan Kinerja		◇		Laporan	160	Laporan	
Menyetujui Laporan Data	◇	◇		Laporan	15	Laporan	
Membuat Laporan Akhir terkait kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Yes		□	Laporan	160	Laporan	

Gambar 4 SOP Pengumpulan data LKIP Diskominfo

SOP di atas dijalankan secara efektif dalam 620 menit atau dalam 10 jam lebih 34 menit, namun adakalanya dikarenakan ketidaksiapan bahan, data yang masih “mentah” dan kurang teradministrasi dengan baik, serta terbatasnya waktu dikarenakan aktifitas dalam menjalankan tupoksi, SOP tersebut kurang efektif dijalankan. Kurang lebih diperlukan waktu satu minggu dalam waktu kerja untuk mengumpulkan seluruh keperluan, data, dan bahan-bahan dalam penyusunan LKIP Tahun 2024 ini.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja Diskominfo Kota Bandung didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Rencana Strategis 2024-2026. Dimana Dokumen Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung karena disadari masyarakat urban merupakan sebuah sistem kompleks dimana aktor-aktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat yang bersifat urban akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi dan informatika sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi dan informatika yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat.

Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis Smart City telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan Smart City tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung, sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung 2024-2026.

Atas dasar itulah Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan urusannya yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TABEL. 2.1
TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO DALAM RANGKA PENCAPAIAN
VISI DAN MISI RPD KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026
SEBELUM PERUBAHAN

NO	TUJUAN (RPD)	INDIKATOR (RPD)	SASARAN (RPD)	INDIKATOR (RPD)	TUJUAN (PD)	INDIKATOR (PD)	SASARAN (PD)	INDIKATOR (PD)
1	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Level Kematangan Smart City	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
							Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

TABEL. 2.2
TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO DALAM RANGKA PENCAPAIAN
VISI DAN MISI RPD KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026
SETELAH PERUBAHAN

NO	TUJUAN (RPD)	INDIKATOR (RPD)	SASARAN (RPD)	INDIKATOR (RPD)	TUJUAN (PD)	INDIKATOR (PD)	SASARAN (PD)	INDIKATOR (PD)
1	Terwujudnya reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Indeks reformasi Birokrasi	Terwujudnya reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Indeks reformasi Birokrasi	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
							Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Target dan Analisis Target Renstra 2024-2026

Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan di dalam Renstra Diskominfo Tahun 2024-2026. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika ada 1 tujuan dan 1 indikator, sedangkan sasaran memiliki 2 sasaran yaitu; 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government; 2 dan Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo.

Target dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPD 2024-2026 ini, dapat di lihat sebagaimana pada Tabel 2.3 sebelum perubahan dan Tabel 2.4 sesudah perubahan di bawah ini.

TABEL 2.3
TARGET TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026
SEBELUM PERUBAHAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Kinerja pada awal Periode RPD (2023)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN		
				2022		2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,61	3,35	Sangat Baik (3,50)	Sangat baik (3,70)	Sangat Baik (4,00)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,61	3,35	Sangat Baik (3,50)	Sangat baik (3,70)	Sangat Baik (4,00)
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	85,53	88,31	88,40	88,50	88,60

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

TABEL 2.4
**TARGET TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026
 SETELAH PERUBAHAN**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Kinerja pada awal Periode RPD (2023)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN		
				2022		2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,61	3,35	Sangat Baik (3,50)	Sangat baik (3,70)	Sangat Baik (4,00)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,61	3,35	Sangat Baik (3,50)	Sangat baik (3,70)	Sangat Baik (4,00)
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	85,53	88,31	88,40	88,50	88,60

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jika dilihat dari perkembangan target pada Renstra Tahun 2024-2026 ditafsirkan sebagai target 100% kinerja pada akhir tahun Renstra ada 2 indikator yang menggunakan pengukuran prosentase dan 2 indikator yang menggunakan poin, maka kita dapat melihat peningkatan target renstra per-tahun pada Gambar 2.

GAMBAR 5. AKUMULASI PERSENTASE TARGET RENSTRA 2024-2026



3.1 Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Hasil evaluasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB ini menjadi indikator sejauhmana pelaksanaan SPBE yang ada pada instansi pemerintah pusat maupun daerah, dari hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah.

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator ini merupakan amanat dari Permen PANRB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur sejauhmana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus pada setiap tahunnya. Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 tidak ada perubahan yaitu;

Tabel 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024
SEBELUM PERUBAHAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2024
1	Terwujudnya reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	A

		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik /SPBE	3,50
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40

*IKU Sebelum Perubahan

Tabel 2.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024
SETELAH PERUBAHAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2024
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	A
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik /SPBE	3,50
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40

*IKU Setelah Perubahan

c. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung tidak ada perubahan, tetapi adanya perubahan penambahan anggaran untuk mendukung Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut;

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

SEBELUM PERUBAHAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,50
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,40
3	Meningkatnya nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Diskominfo	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Prosentase	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.158.595.047	APBD
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	4.740.218.0065	APBD
3	Program Aplikasi Informatika	11.655.083.773	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.655.361.460	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	794.201.700	APBD

Sumber : DPA Murni 2024 Diskominfo

Tabel 2.8
PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024
SETELAH PERUBAHAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,50
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,40

3	Meningkatnya nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Diskominfo	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Prosentase	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.658.595.047	APBD Perubahan
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	4.940.218.006	APBD Perubahan
3	Program Aplikasi Informatika	11.655.083.773	APBD Perubahan
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.455.361.460	APBD Perubahan
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	794.201.700	APBD Perubahan

Sumber : DPA Perubahan 2024 Diskominfo



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah menetapkan 2 sasaran dalam Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai, ke 2 sasaran tersebut diukur dengan menetapkan 2 indikator kinerja utama yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,50	4.59	131,14%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,40	95,89	108,47%

Keterangan; IKU Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari tabel 3.1 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian IKU yang mencerminkan keberhasilan rata-rata di atas 100% dari target 2 target yang ditetapkan. Dalam LKIP Tahun 2024, semua indikator adalah IKU (Indikator Kinerja Utama).

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Pada bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi. Perhitungan capaian kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta menunjukkan validitas data kinerja yang hitung dalam capaian kinerja.

Sasaran 1: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi yang ada di Pemerintah Kota Bandung. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Bandung untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Bandung.

Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pedoman pada evaluasi yang dapat

dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE dan dukungan oleh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Pada sasaran pertama yang dicapai pada Tahun 2024 ini, Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government dengan indikator Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini;

TABEL. 3.2
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025	TAHUN 2026
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET RPD	TARGET RPD
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,35	3,98	109,46	3,50	4,59	131,14	3,70	4,00

Instrumen/ cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur suatu nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE. Adapun target pematangan level SPBE pada Tahun 2024 adalah Triwulan 1 (persiapan); Triwulan 2 (proses pelaksanaan pematangan SPBE); Triwulan 3 (proses pelaksanaan pematangan SPBE); dan Triwulan 4 (Level pematangan SPBE). Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

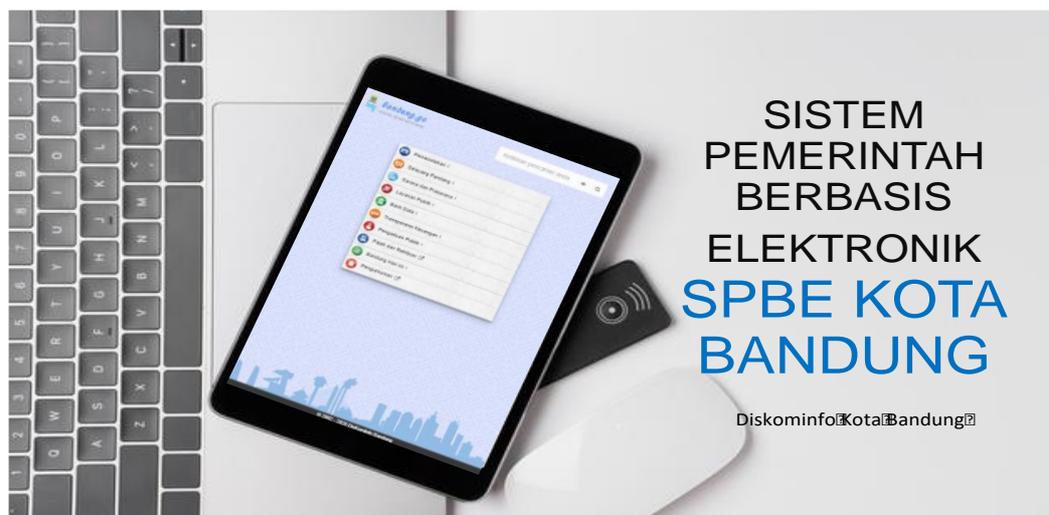
Capaian indikator 1 = Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PAN RB RI

Hasil evaluasi dari Kementerian PANRB ini merupakan salah satu pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan SPBE ke depan untuk lebih baik lagi.

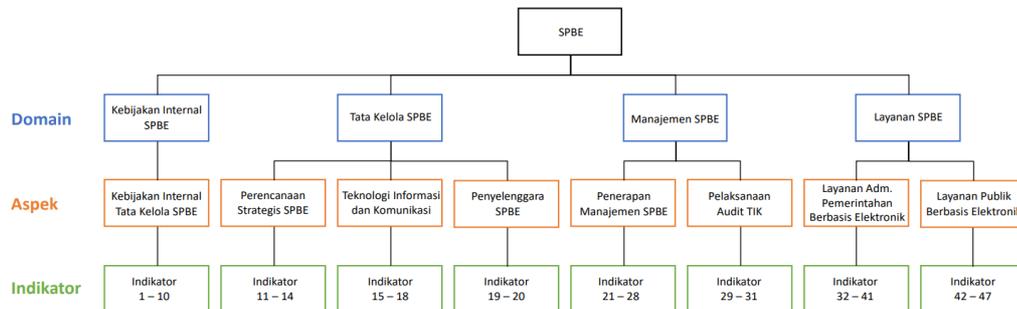
a. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Pada Tahun 2024, indikator “Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)” memiliki target 3,50 Nilai terealisasi poin 4,59 Nilai atau 131,14%. Dari target tersebut menggambarkan indikator tersebut telah tidak melebihi target yang telah ditentukan.

No	URAIAN	Rencana 2024	Realisasi 2024
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)	3,50 Nilai	4,59 Nilai



PM PANRB 59/2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE.



b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Realisasi pada Tahun 2024 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pada Tahun 2023 memperoleh Nilai terealisasi 3,98 Nilai atau 118,81%, dan pada Tahun 2024 memperoleh nilai dari target 3,50 terealisasi 4,59 Nilai atau 131,14%, sebagai gambaran perolehan Tahun 2019 nilai 3,72; Tahun 2020 memperoleh 3,20 dan Tahun 2021 memperoleh 3,19.

No	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)	3,72 Nilai	3,20 Nilai	3,19 Nilai	3,61 Nilai	3,98 Nilai	4,59 Nilai

c. Realisasi Kinerja dengan Akhir Tahun Berjalan

Kinerja pada Tahun 2024 indikator “Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)” dengan akhir tahun berjalan, pada Tahun 2024 yaitu realisasi sebesar 4,59 Nilai bila dibandingkan dengan target tahun berjalan sebesar 3,50 Nilai atau 131,14%

No	URAIAN	REALISASI TAHUN 2024	AKHIR TAHUN 2024
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)	4,59 Nilai	3,50 Nilai

d. Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Kinerja pada indikator “Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)” dengan kinerja instansi lainnya, dapat disandingkan berdasarkan hasil Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 terutama di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki nilai tertinggi katagori tingkat kota di Indonesia, tingkat kabupaten tertinggi Kabupaten Banyuwangi 4,77 dan tingkat provinsi di raih Provinsi Jawa Barat 4,73 (Memuaskan) dapat dilihat pada dibawah ini;

INDEX SPBE 2024 TINGKAT KOTA

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kota Bandung	4,59	Memuaskan
2	Pemerintah Kota Madiun	4,57	Memuaskan
3	Pemerintah Kota Surabaya	4,54	Memuaskan

INDEX SPBE 2024 TINGKAT PROVINSI

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,73	Memuaskan
2	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,53	Memuaskan
3	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4,46	Memuaskan

INDEX SPBE 2024 TINGKAT KABUPATEN

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Banyuwangi	4,77	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Kediri	4,63	Memuaskan
3	Pemerintah Kab. Sumedang	4,51	Memuaskan

GAMBAR 6 INDEX SPBE 2024 TINGKAT KOTA, PROVINSI, DAN KABUPATEN

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Output dari program/ kegiatan/ anggaran ini adalah upaya untuk meningkatkan level pematangan smart city yang mengkoordinasikan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2024 ini diantaranya:

- ❖ Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat
- ❖ Adanya komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam peningkatan level kematangan SPBE .
- ❖ Adanya dukungan dari perangkat daerah dalam menggunakan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Nilai capaian Index SPBE bukan hanya jadi tanggungjawab Diskominfo sehingga dalam indikator penilaiannya perlu melibatkan semua perangkat daerah dan OPD yang bertanggungjawab dalam rencana strategis Kota seperti Bappelitbang, Proses Bisnis di Bagian organisasi, rencana anggaran dengan BKAD dan Tim TAPD, Manajemen Risiko dan Audit dengan Inspektorat, Manajemen SDM dan Pengetahuan dengan BKPSDM serta berbagai layanan internal dan Publik di masing-masing Perangkat Daerah.

2. Kebutuhan kecepatan dan spesifikasi internet pada masing-masing OPD belum sesuai dengan kapasitas. Dikarenakan masing-masing OPD memiliki kebutuhan kecepatan internet yang perlu diukur lebih lanjut sesuai dengan penggunaannya
3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kualitas konten media sosial baik gambar, video maupun audio.
4. Kurangnya wawasan dari pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik dan pengelola pengaduan publik di OPD akibat dari pergantian petugas
5. Kurangnya koordinasi mengenai OPD yang memberikan layanan kegawatdaruratan;
6. Secara kelembagaan, perlu adanya unit kerja khusus untuk pengembangan sistem informasi.
7. Integrasi Sistem Informasi dan berbagi pakai data dengan lembaga vertikal masih terkendala di dalam pemanfaatan platform Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dikarenakan belum semua lembaga vertikal menggunakan layanan SPLP ini.
8. Untuk internal Kota Bandung, belum semua perangkat daerah memahami dan bisa memanfaatkan layanan SPLP ini dikarenakan SDM kurang .
9. Implementasi urusan statistik sangat bergantung pada peran aktif dari seluruh perangkat daerah. Sehingga ketika perangkat daerah dengan bobot pekerjaan yang tinggi, menghambat proses pencapaian target urusan statistik.

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

1. menerapkan Indikator kinerja SPBE di berbagai Perangkat daerah sehingga target dan capaian dapat menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya diskominfo.
2. Dilakukan asistensi ke masing-masing OPD terhadap kebutuhan layanan internet yang disesuaikan kecepatannya dengan penggunaan, sehingga lebih efisien dan efektif
3. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pembuatan konten media sosial sesuai anggaran yang tersedia
4. Bimbingan teknis serta pelatihan untuk pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik serta pengelola pengaduan publik dari OPD
5. Rapat koordinasi diantara OPD yang memberikan layanan kegawatdaruratan.
6. Membentuk unit kerja khusus yang mengurus pengembangan sistem informasi.
7. Mendorong kementerian Komdigi untuk lebih proaktif mensosialisasikan pemanfaatan SPLP ke lembaga-lembaga vertikal.
8. Mengadakan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap perangkat daerah yang kesulitan dalam memanfaatkan layanan SPLP ini sebagai wadah berbagi pakai data dan integrasi Sistem Informasi.
9. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, salah satunya dengan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang paling berkontribusi dalam pengelolaan urusan statistik

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

SASARAN 1 “Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government dengan indikator Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selama Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah melakukan berbagai efisiensi antara lain;

- ❖ Mengoptimalkan Sumber daya Manusia (SDM) dengan jumlah SDM yang dimiliki sebanyak 77 orang yang dibantu dengan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
- ❖ Sarana dan prasarana kerja seperti; penggunaan AC, listrik, lampu, computer digunakan pada saat jam kerja selesai langsung dimatikan;
- ❖ Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- ❖ Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin;

Capaian kinerja sasaran pertama dari target kinerja nilai 3,50 terealisasi sebesar nilai 4,59 atau 131.14 % sedangkan penunjang pencapaian kinerja dalam penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dari pagu yang ada sebesar Rp. 18.844.864.939,- terealisasi sebesar Rp. 18.460.945.148,- atau 97,96%, sasaran ini memiliki tingkat efisiensi dan tingkat efektivitasnya yang tinggi, hal tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini;

TABEL 3.3

TINGKAT AKUNTABILITAS KEUANGAN

**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Periode 2024 - 2026
Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
							1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.655.083.773	11.350.523.262	97.39
							2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.455.361.460	1.453.498.269	99.87
							3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	794.201.700	739.893.843	93.16
							4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.940.218.006	4.917.029.774	99.53
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						TOTAL PER SASARAN	18.844.864.939	18.460.945.148	97.96

Sumber : e-sakip Dinas Komunikasi dan Informatika

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan, dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini;

Tabel. 3.4
Capaian Program Tahun 2024

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	2024			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Komunikasi dan Informatika							
Dinas Komunikasi dan informatika							
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100%	<p>Persentase dukungan kinerja layanan sarana dan prasarana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo.</p> <p>Formulasi : layanan kinerja : Kebutuhan layanan x 100%. Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama</p> <p>Pendukung : Tersedianya SDM dan peralatan yang memadai.</p> <p>Hambatan : Masih adanya keterbatasan ruangan untuk pelayanan khususnya kepada masyarakat.</p> <p>Solusi : Memanfaatkan ruangan yang ada dan melakukan penataan sesuai dengan kebutuhan.</p>

2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	Hasil	2.4	3.0	125.00%	<p>Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Layanan SPBE, Indikator Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik pada Bidang Diseminasi Informasi dengan memberikan layanan informasi baik sosialisasi melalui media cetak, elektronik, media daring, sosialisasi melalui tatap muka, media sosial, Kegiatan Bandung Menjawab sebanyak 10 episode.</p> <p>Formulasi: Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024</p> <p>Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama</p> <p>Dukungan : Koordinasi dengan Pewartu Balaikota Bandung (PBB), media daring dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung memudahkan penyampaian informasi/klarifikasi/sosialisasi dan edukasi pada Program Bandung Menjawab menjadi lebih akurat karena informasi diperoleh langsung dari OPD terkait.</p> <p>Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi terkait layanan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diantaranya melalui media cetak, media elektronik (website PPID), dan media sosial PPID Kota Bandung.</p> <p>Saat ini, permohonan informasi Pemerintah Kota Bandung juga dilakukan secara digital dan satu pintu, yaitu melalui Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK/ https://ppid-simonik.bandung.go.id/). Hal ini juga diperkuat oleh koordinasi antara Diskominfo selaku PPID Utama dengan 77 PPID Pembantu yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah baik dinas, badan, bagian, kecamatan, BLUD, dan BUMD, serta 347 PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan dari tingkat SMP Negeri hingga tingkat SD Negeri di Kota Bandung. Koordinasi yang kuat antar PPID Pembantu, dan PPID Sub Pembantu satker Pendidikan membuat penyelenggaraan pelayanan</p>
---	---	--	-------	-----	-----	---------	---

							<p>informasi publik dapat berjalan sesuai SOP, dan setiap tahun melakukan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, menyiapkan desk layanan informasi di Mall Pelayanan Publik, serta melakukan monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Koordinasi dengan OPD, lembaga dan organisasi lainnya berkaitan dengan isu hangat yang terjadi di Kota Bandung.</p> <p>Sementara itu dari segi layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID perlu dilakukan penguatan teknis SDM dalam penggunaan layanan SIMONIK, serta pengembangan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) itu sendiri. Serta sosialisasi keterbukaan informasi public kepada masyarakat Kota Bandung. Formulasi:</p> <p>Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementrian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024</p> <p>Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama</p> <p>Hambatan : Sarana dan prasaran yang kurang memadai, sehubungan dengan lokasi Bandung Menjawab selalu berpindah. Ada kalanya narasumber yang hadir bukan pucuk pimpinan dan pengambil keputusan.</p> <p>Solusi : Melengkapi sarana dan prasana pendukung Bandung Menjawab seperti penguatan jaringan internet (kaitan streaming), alat-alat broadcast dan lainnya.</p> <p>Diharapkan narasumber yang hadir adalah pengambil keputusan sehingga informasi yang disampaikan tepat.</p>
		<p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata</p>	<p>Nilai</p>	<p>88,40</p>	<p>88.51</p>	<p>100,13%</p>	<p>Nilai hasil survei yang disampaikan kepada masyarakat dan narasumber atas pelayanan kinerja UPT. Radio Sonata sebanyak 184 responden selama Tahun 2024</p> <p>Formulasi : Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB No 14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan</p>

							<p>Masyarakat. Survei kepada perangkat daerah dan masyarakat terhadap layanan Radio Sonata.</p> <p>Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama.</p> <p>Dukungan : Terlaksananya dan ketersediaan data dari para pemanfaatan fasilitas radio dengan menyampaikan informasi data survei</p> <p>Hambatan : Tidak semua narasumber dan masyarakat mengisi survei yang disediakan. Kesulitan menggunakan aplikasi survei.</p> <p>Solusi : Membuat akses yang lebih mudah digunakan dalam perolehan hasil survei</p>
		<p>Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio</p>	<p>Hasil</p>	<p>0.4</p>	<p>0.4</p>	<p>100,00%</p>	<p>Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Layanan SPBE, Indikator Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Radio Sonata sebanyak 255 kali talkshow dan 275 kali liputan kegiatan offair selama Tahun 2024.</p> <p>Formulasi: Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementrian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama</p> <p>Dukungan : Adanya dukungan dari masyarakat khususnya perangkat daerah, komunitas dan lembaga lainnya dalam upaya memberikan informasi sebagai narasumber kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya;</p> <p>Hambatan : Layanan materi informasi masih belum maksimal serta Kehadiran Narasumber Berubah.</p> <p>Solusi : Berupaya untuk melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, komunitas dan lembaga lainnya sebagai narasumber</p>
		<p>Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR</p>	<p>Nilai</p>	<p>100</p>	<p>98.33%</p>	<p>98,33%</p>	<p>Pelayanan Pengaduan Masyarakat di pusatkan dalam 1 kanal pengaduan melalui aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dilakukan secara online</p>

		yang ditindaklanjuti					<p>melalui https://www.lapor.go.id . Dimana terdapat 229 orang admin yang bertugas menindaklanjuti pengaduan (48 admin OPD, 30 admin Kecamatan, 151 admin Kelurahan). Dimana untuk pengelolaan LAPOR pada tahun 2024 terdapat 953 laporan terdiri dari belum ditindaklanjuti 16 laporan, 937 laporan status selesai.</p> <p>Formulasi : Menghitung jumlah laporan yang masuk, sudah di proses dan selesai ditindaklanjuti. Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama</p> <p>Dukungan : Koordinasi dengan admin LAPOR! pada instansi di Pemerintah Kota Bandung membuat pengaduan masyarakat yang masuk dapat ditangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat.</p> <p>Hambatan : Mutasi dan Rotasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung membuat sering terjadinya perubah admin yang bertugas menindaklanjuti pengaduan sehingga sering terjadinya keterlambatan dalam menindaklanjuti pengaduan dikarenakan diperlukannya pelatihan kepada admin yang baru.</p> <p>Solusi : Untuk pengelolaan pengaduan diperlukan bimbingan teknis secara rutin kepada para admin yang bertugas menindaklanjuti pengaduan juga diperlukannya sosialisasi secara masif kepada masyarakat baik melalui media sosial, meida cetak, media elektronik, sosialisasi melalui tatap muka, media luar ruang (seperti cetak spanduk, x-banner dan baliho).</p>
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	Nilai	36,00	45.45	126.25%	<p>Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Tata Kelola SPBE, Sub Domain Manajemen SPBE, Sub Domain Layanan Internal dan Sub Domian Layanan Publik pada Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun/ mengembangkan aplikasi layanan administrasi maupun aplikasi layanan publik sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat.

							<p>2. Mengintegrasikan aplikasi, baik itu aplikasi milik pemerintah kota Bandung, maupun aplikasi milik pemerintah Pusat.</p> <p>Formulasi:</p> <p>Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementrian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama</p> <p>Pendukung :</p> <p>Regulasi, Manajemen & Tata Kelola yang baik sesuai peraturan yang berlaku, serta dukungan dari pimpinan, SDM dan infrastruktur.</p> <p>Hambatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih adanya regulasi yang harus ditetapkan untuk mendukung implementasi aplikasi layanan publik maupun layanan Administrasi Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan yang berlaku perlu ditingkatkan. Dukungan dari Perangkat Daerah perlu ditingkatkan. <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun draft peraturan perundangan Melaksanakan sosialisasi dan edukasi. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah.
		<p>Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evelyasi dan Pengembangan</p>	<p>Nilai</p>	<p>22.30</p>	<p>31.50</p>	<p>141.25%</p>	<ol style="list-style-type: none"> Telah Dilakukan Update Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2024-2029 Telah diterbitkan Kebijakan Manajemen SPBE <p>Formulasi:</p> <p>Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementrian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024</p> <p>Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama.</p>

							<p>Dukungan : Kebijakan Berupa Peraturan Walikota tentang Kebijakan Internal SPBE , Arsitektur, Peta rencana dan manajemen</p> <p>Hambatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran Kegiatan 2. Keterbatasan waktu dan sumber daya manusia untuk memenuhi semua tingkat manajemen SPBE <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Anggaran kegiatan untuk mendukung Kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE 2. Memulai persiapan lebih awal terkait koordinasi dan konsolidasi penyusunan kebijakan internal SPBE, Tatakelola dan Manajemen SPBE 3. Menambah jumlah SDM untuk manajemen SPBE
		<p>Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur</p>	<p>Nilai</p>	<p>4,5</p>	<p>7,4</p>	<p>164,45%</p>	<p>Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Manajemen SPBE dan Sub Domain Layanan SPBE dengan memberikan layanan bandwidth sebanyak 800 Mbps dengan alokasi layanan mencakup operasional Diskominfo, layanan server dan pusat jaringan intra pemerintah kota Bandung, 170 titik tiang CCTV dan server yang terpusat di Diskominfo dan telah terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (Kemenkominfo) dan Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Formulasi:</p> <p>Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024</p> <p>Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama.</p> <p>Hambatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya alokasi layanan bandwidth OPD sehingga layanan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) kota Bandung berjalan kurang optimal.

							<p>2. Sumber daya TIK (storage server, processor, memori) yang tersedia semakin sedikit karena adanya pengembangan aplikasi-aplikasi yang semakin besar.</p> <p>3. Perangkat pendukung keamanan sistem informasi yang belum memadai untuk mendeteksi dan melindungi server dan aplikasi dari serangan siber.</p> <p>Solusi : Melakukan peningkatan kapasitas bandwidth untuk akses internet perangkat daerah dalam rangka optimalisasi manajemen dan monitoring bandwidth perangkat daerah serta Jaringan Intra Pemerintah (JIP) kota Bandung. Melaksanakan kajian cellplan menara telekomunikasi serta telah tersusunnya dokumen manajemen aset TIK yang lengkap dan terstruktur. Melengkapi sistem proteksi server dengan perangkat firewall dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya TIK server (storage, processor, memori), dilakukan pemanfaatan Pusat Data Nasional dari Kemenkominfo, dan Server dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Urusan Statistik							
Dinas Komunikasi dan informatika							
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Nilai	3,3	4,5	136,36%	<p>Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik terdiri dari 2 komponen, yaitu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data dan Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka, pada indikator SPBE. Untuk nilai keseluruhan, diperoleh indeks SPBE sebesar 4,59, dan berdasarkan perhitungan bobot lingkup Data dan Statistik, diperoleh nilai sebesar 4,5</p> <p>Formulasi : Nilai Kematangan lingkup data berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis</p>

							<p>Elektronik pada Kementrian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Sub Domain Layanan SPBE, yaitu rata-rata dan pembobotan dari Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data dan Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka, yaitu sebesar 3,9.</p> <p>Hambatan : Telah dilakukan beberapa langkah dalam peningkatan manajemen data dan layanan data diantaranya dengan pengembangan aplikasi Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi (SIPEDASI) dan pelaksanaan Bimbingan teknis bagi para pengelola data. Namun berdasarkan hasil evaluasi, keterbatasan sumber daya di Perangkat Daerah mengakibatkan tumpang tindihnya beban kerja sehingga mempengaruhi proses penyelesaian pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Solusi : Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya pada Perangkat Daerah.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Urusan Persandian							
Dinas Komunikasi dan informatika							
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	Nilai	1.2	1.3	108,33%	<p>Nilai Indeks yang diperoleh pada Sub Domain Manajemen SPBE dengan Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi dan Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.</p> <p>Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan proses pendampingan dan sertifikasi ISO 2700 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, kegiatan tersebut mendukung dari penerapan Manajemen Keamanan Informasi. Sedangkan untuk Audit Keamanan SPBE telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman internal. Terkait Pedoman dan Tata Cara Audit Keamanan dari BSSN baru disahkan pada akhir tahun dan</p>

						<p>menunggu sosialisasi juklak dan juknis pelaksanaan audit sesuai dengan Perban BSSN.</p> <p>Formulasi : berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024</p> <p>Nilai % capaian kinerja diperoleh dari nilai realisasi pada tahun yang bersangkutan dibagi dengan target pada tahun yang sama dikali 100%</p> <p>Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diraihnya sertifikasi ISO 27001 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi; 2. Telah dilakukan audit keamanan SPBE; 3. Terjalinnnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan BSSN. 4. Meningkatkan perlindungan data dengan instalasi Sandi Data oleh BSSN. 5. Verifikasi Indeks KAMI oleh BSSN.
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika_2024

Tabel. 3.5
Realisasi Program/Kegiatan Sasaran 1 Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1	2	3	4	5
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0.4 Nilai	0.4 Nilai
		Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	100 Persentase	98.33 Persentase
		Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	2.4 Nilai	3.0 Nilai

		Nilai layanan informasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata masyarakat melalui radio	88.40 Nilai	88.51 Nilai
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	91 Presentase	91 Presentase
2.16.02.2.01.02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Jumlah Dokumen Hasil Moitoring Opini dan Aspirasi Publik	3 Dokumen	3 Dokumen
2.16.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen
2.16.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen
2.16.02.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	- Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4 Dokumen	4 Dokumen
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Eevaluasi dan Pengembangan	22.30 Nilai	31.70 Nilai
		Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	36.0 Nilai	45.1 Nilai
		Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	4.5 Nilai	6.9 Nilai
2.16.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan Interkoneksi	60 PD	60 PD
2.16.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	- Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	200 Unit	200 Unit
2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang Terintegrasi	90 Aplikasi	90 Aplikasi
2.16.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34 Dokumen	34 Dokumen
2.16.03.2.02.02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	- Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan	2 Dokumen	2 Dokumen

		Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		
2.16.03.2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik	- Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinronisasi Data dan Informasi Elektronik	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah
2.16.03.2.02.07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	5 Unit
2.16.03.2.02.08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	- jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	6 Layanan	6 Layanan
2.16.03.2.02.09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	- Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	2 Dokumen
2.16.03.2.02.10	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	- Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pegelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Dokumen	2 Dokumen
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2.20.0.00.0.00.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	3.3 Nilai	3.9 Nilai
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat	1000 Data	1000 Data
2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistika Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen
2.20.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	- Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	6 Orang	6 Orang
2.20.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	- Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2.21.0.00.0.00.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	1.2 Nilai	1.2 Nilai
2.21.02.20.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	7 Aplikasi	7 Aplikasi
2.21.02.20.1.04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan Keamanan Informasi	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika_2024

Sasaran 2: Indeks Kepuasan Masyarakat.

Penjelasan umum sasaran dan indikator

Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Permen PANRB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat (Sinambela, 2010, hal : 5). Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu, dan apabila kenyataan sama dengan harapan, maka layanan disebut memuaskan (Lupiyoadi, 2001, hal: 148).

Dalam kenyataannya pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam upaya memberikan

pelayanan optimal kepada masyarakat, diperlukan Reformasi Pelayanan Publik, (Sinambela, 2010, hal : 5) menyatakan bahwa pelayanan publik dapat diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan peraturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan itu diperlukan penilaian mandiri (self assesment) yang sesuai dengan dengan Permenpan nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana salah satu sasaran dari keberhasilan reformasi birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada sasaran Kedua yang dicapai pada Tahun 2024 ini, Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, dapat dilihat pada Tabel 3.14 di bawah ini;

TABEL. 3.6
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		%	TAHUN 2024		%	TAHUN 2025	TAHUN 2026
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET RPD	TARGET RPD
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	90,92	100,62	88,40	95,89	108,47	88.50	88,60

Instrumen/ cara perhitungan indikator

Pengukuran capaian indikator 2 dilakukan dengan melihat data total jumlah responden masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung . Adapun layanan yang diberikan mulai dari ;

1. Persyaratan Pelayanan yang Diberikan Sudah Sesuai
2. Prosedur Pelayanan yang Diberikan Mudah
3. Waktu Pelayanan yang Diberikan Tepat Sesuai SOP

- 4 Produk Layanan Sesuai dengan yang Diminta
- 5 Kemampuan Petugas dalam Memberikan Pelayanan Memadai
- 6 Pelayanan yang Telah Diberikan Memuaskan
- 7 Petugas yang Memberikan Pelayanan Ramah
- 8 Produk Layanan yang Dijanjikan Diberikan Tepat Waktu
- 9 Tindak Lanjut Pengaduan/Layanan Memuaskan

Dengan menggunakan formulasi perhitungan:

Capaian indikator 2

= Berdasarkan hasil survai pelayanan Diskominfo terhadap masyarakat

h. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2024, indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 88,40 Nilai terealisasi sebesar 95,89 Nilai atau 108,47% (melebihi target yang telah ditentukan).

No	URAIAN	Rencana 2024	Realisasi 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 poin	95,89 poin

**LAPORAN HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
 PADA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA BANDUNG
 2024**

1. Indeks Per Unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut:

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3.87
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2)	3.82
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3.86
4	Biaya/Tarif (U4)	3.99
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3.77
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3.77
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3.84
8	Sarana dan Prasarana (U8)	3.79
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	3.82
10	Nilai Unsur Tertinggi	3.99
11	Nilai Unsur Terendah	3.77

Keterangan : Jumlah Responden sebanyak : 94 orang

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:
 $(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11) = 3.84$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

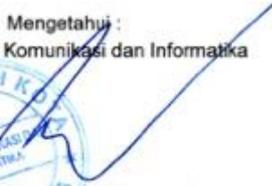
- a. Nilai IKM setelah dikonversi = **95.89**
- b. Mutu Pelayanan = **A**
- c. Kinerja unit pelayanan adalah **Sangat baik**

2. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

- a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : **U5, U6, U8**
- b. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : **U4, U1**
- c. Upaya untuk meningkatkan unsur pelayanan :
- d. Upaya untuk mempertahankan unsur pelayanan :

Mengetahui :
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


 Y. Ahmad Briyana, S.Sos., M.Si
 NIP. 197311271993031003

Bandung, 31 Desember 2024
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


 M. Rijwan Fathony, S.STP., M.I.P
 NIP. 199406102016091001

GAMBAR 7 LAPORAN HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

i. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya**

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ketika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu pada Tahun 2024 berdasarkan hasil survai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh sebesar 95,89 Nilai bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 90,92 Nilai, realisasi Tahun 2019 memperoleh 79,94, Tahun 2020 memperoleh 84,72 dan Tahun 2021 memperoleh 85,19.

No	URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,94 Nilai	84,72 Nilai	85,19 Nilai	85,53 Nilai	90,92 Nilai	95,89 Nilai

j. **Realisasi Kinerja dengan Akhir Tahun Berjalan**

Capaian kinerja Tahun 2024 ketika dibandingkan dengan capaian kinerja akhir tahun berjalan Tahun 2024 yaitu sebesar 95,89 Nilai bila disandingkan dengan target tahun berjalan yaitu sebesar 88,40 Poin atau 108,47%.

No	URAIAN	Realisasi 2024	Akhir Tahun 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,89 Nilai	88,40 Nilai

k. **Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional**

Kinerja pada indikator per triwulan yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan kinerja instansi lainnya, bila dibanding dengan dengan perangkat daerah khususnya dengan Sekretariat, Badan dan Dinas di luar perangkat daerah kecamatan. Dinas Komunikasi dan Informatika pada semester 2 Tahun 2024 memperoleh 95,89 Nilai (A) dibandingkan standar nasional belum ada data yang disandingkan. Namun demikian kalo disandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya Diskominfo memperoleh paling tinggi, sedangkan nilai perangkat daerah paling rendah diperoleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 85,63 (B).

1. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Output dari indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” ini adalah: Hasil survai berdasarkan pertanyaan kepada masyarakat atas pelayanan Dalam mencapai sasaran program/kegiatan tersebut, Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran, ada beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” pada Tahun 2024 ini, yaitu;

1. Dukungan dari tim survai Indeks Kepuasan Masyarakat yang terpadu;
2. Adanya data survai dari masyarakat melalui web diskominfo dan isian yang disediakan oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan diskominfo;
3. Adanya dukungan IT yang mumpuni dalam pelaksanaan survai dan kelancaran dalam pelaksanaan survai.

Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat ” pada Tahun 2024, faktor penghambat dalam pelaksanaan survai yaitu; Pemahaman masyarakat dalam produk pelayanan Diskominfo khususnya kewenangan antara pusat dan daerah;

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami dapat memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari, yaitu memberikan pemahaman tugas

dan pokok diskominfo sesuai dengan peraturan yang ada, karena kewenangan pusat seperti; pelayanan untuk memblokir situs yang bersifat negatif.

Pemahaman kepada masyarakat itu ditindaklanjuti dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan internet bersifat bijak kepada sekolah-sekolah maupun kepada orang tua murid untuk selalu mengawasi anak-anaknya dalam melakukan kegiatan browsing di internet.

m. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

SASARAN 2 “Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, Selama Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah melakukan berbagai efisiensi antara lain;

- Mengoptimalkan Sumber daya Manusia (SDM) dengan jumlah SDM yang dimiliki sebanyak 77 orang yang dibantu dengan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
- Sarana dan prasarana kerja seperti; penggunaan AC, listrik, lampu, computer digunakan pada saat jam kerja selesai langsung dimatikan;
- Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin;

Capaian kinerja sasaran kedua dari target kinerja 88,40 Nilai terealisasi sebesar 95,89 Nilai atau 108,47 % sedangkan penunjang pencapaian kinerja dalam penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dari pagu yang ada sebesar Rp. 22.658.595.047,- terealisasi sebesar Rp. 21.702.464.836,- atau 95,78% dan tingkat efektifitas yang tinggi, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

TABEL 3.7

TINGKAT AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Periode 2024 - 2026

Tahun 2024

				Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%	
		02.01	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Nilai	88.40.00	95,89	108.47	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.658.595.047	21.702.464.836	95.78
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR							TOTAL PER SASARAN	22.658.595.047	21.702.464.836	95.78

Sumber : e-sakip Dinas Komunikasi dan Informatika

n. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini;

Tebel. 3.8
Capaian Program Tahun 2024

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	2023			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Komunikasi dan Informatika							
Dinas Komunikasi dan informatika							
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	<p>Prosentase dukungan kinerja layanan sarana dan prasarana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo.</p> <p>Formulasi ; layanan kinerja : Kebutuhan layanan x 100%.</p> <p>Pendukung : Tersedianya SDM dan peralatan yang memadai.</p>

							<p>Hambatan :</p> <p>Masih adanya keterbatasan ruangan untuk pelayanan khususnya kepada masyarakat.</p> <p>Solusi :</p> <p>Memanfaatkan ruangan yang ada dan melakukan penataan sesuai dengan kebutuhan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika_2024

Tabel. 3.9

Realisasi Kinerja Kegiatan Sasaran 2 Diskominfo Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1	2	3	4	5
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.2.20.2.21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan
2.16.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan

2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan
2.16.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	77 orang	77 orang
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan
2.16.01.2.05.0002	Sub Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket
2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 sub kegiatan	7 sub kegiatan
2.16.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket
2.16.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	- Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	12 Paket
2.16.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket
2.16.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket
2.16.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen
2.16.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan
2.16.01.2.06.09	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 sub kegiatan	2 sub kegiatan
2.16.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan
2.16.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	12 Laporan	12 Laporan

2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan
2.16.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit
2.16.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	116 Unit
2.16.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	- jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika_2024

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024, dari 3 urusan yang diampu yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika; Urusan Statistik dan Urusan Persandian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini;

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5

2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39.253.896.826	37.970.017.872	96,73%
2.16.2.20.2.21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39.253.896.826	37.970.017.872	96,73%
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.658.595.047	21.702.464.836	95,78%
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.213.540	133.505.250	98,74%
2.16.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.213.540	133.505.250	98,74%
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.178.808.918	16.414.134.333	95,55%
2.16.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.178.808.918	16.414.134.333	95,55%
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	183.589.870	181.596.000	98,91%
2.16.01.2.05.0002	Sub Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	183.589.870	181.596.000	98,91%
2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.908.445.595	1.881.279.880	98,58%
2.16.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	578.576.702	571.810.050	98,83%
2.16.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	151.887.294	150.887.295	99,34%
2.16.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.090.622	158.639.325	99,72%
2.16.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.081.517	92.198.550	96,97%
2.16.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	126.108.960	126.108.960	100,00%
2.16.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	327.962.500	316.066.200	96,37%

2.16.01.2.06.09	Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	469.738.000	465.569.500	99,11%
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.857.507.128	1.835.330.177	98,81%
2.16.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.705.000	30.439.049	93,07%
2.16.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.824.802.128	1.804.891.128	98,91%
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.395.029.996	1.256.619.196	90,08%
2.16.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	895.044.100	781.840.000	87,35%
2.16.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.196.500	177.458.986	89,09%
2.16.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	300.789.396	297.320.210	98,85%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.940.218.006	4.917.029.774	99,53%
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	4.940.218.006	4.917.029.774	99,53%
2.16.02.2.01.02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	857.610.000	841.974.039	98,18%
2.16.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	662.022.100	661.185.000	99,87%
2.16.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	1.976.313.906	1.973.858.460	99,88%
2.16.02.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.444.272.000	1.440.012.275	99,71%
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	11.655.083.773	11.350.523.262	97,39%

2.16.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	2.261.148.429	2.164.517.481	95,73%
2.16.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.261.148.429	2.164.517.481	95,73%
2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.393.935.344	9.186.005.781	97,79%
2.16.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	4.344.432.624	4.322.770.183	99,50%
2.16.03.2.02.02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	313.428.000	313.171.300	99,92%
2.16.03.2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik	343.239.500	342.976.600	99,92%
2.16.03.2.02.07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.308.707.720	1.277.857.680	97,64%
2.16.03.2.02.08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.330.507.500	2.175.979.918	93,37%
2.16.03.2.02.09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	454.842.400	454.700.400	99,97%
2.16.03.2.02.10	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	298.777.600	298.549.700	99,92%
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.455.361.460,00	1.453.498.269	99,87%
2.20.0.00.0.00.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.455.361.460	1.453.498.269	99,87%
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.455.361.460	1.453.498.269	99,87%

2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	684.924.100	684.521.389	99,94%
2.20.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	284.310.000	282.865.130	99,49%
2.20.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	486.127.360	486.111.750	100,00%
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	794.201.700,00	739.893.843,00	93,16%
2.21.0.00.0.00.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	794.201.700	739.893.843	93,16%
2.21.02.20.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	794.201.700	739.893.843	93,16%
2.21.02.20.1.04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	794.201.700	739.893.843	93,16%
JUMLAH				

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika_2024

PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

Perbandingan kinerja dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan kinerja kedepannya. Perbandingan kinerja Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan baik capaian kinerja maupun presentase kinerja.

1. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perbandingan kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.19. Sedangkan perbandingan persentase kinerja dapat di lihat pada Tabel 3.20 di bawah ini;

TABEL 3.11

PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian									
			2024									
			TW1		TW2		TW3		TW4			
			T	C	T	C	T	C	T	C		
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,30	3.61	3,50	3.99 (Mandiri)	3,50	3.95 (Mandiri)	3,50	4.05 (Mandiri)	3,50	4,59 (Kemenpan)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85,53	-	-	88,40	95.70	-	-	88,40	95,89

Keterangan:

T: Target C: Capaian

TABEL 3.12

PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA, TAHUN 2023, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2024				
			TW1	TW2	TW3	TW4	
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	118,81%	110,85%	119,57%	115,72%	118,81%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	102,96%	--	108,26%	-	102,96%

Di Tabel 3.20, kita dapat melihat peta capaian kinerja Tahun 2024. Pada Tahun 2024 terlihat beberapa indikator sasaran berwarna biru menunjukkan capaian yang melebihi target yang didefinisikan di Renstra Diskominfo 2024-2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2024-2026

Untuk melihat kondisi akhir capaian kinerja terhadap target Renstra 2024-2026, maka data capaian dan presentase kinerja pada Tahun 2024 perlu dibandingkan dengan Renstra 2013-2018. Hal ini untuk melihat secara rasional pencapaiannya Renstra, dan juga untuk menentukan rencana aksi, baik untuk pencapaian target Renstra, maupun untuk evaluasi kinerja Diskominfo Kota Bandung secara keseluruhan, terutama indikator-indikator sasaran yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan *core business* dari PD, dalam hal ini, Diskominfo Kota Bandung. Untuk Tahun 2024 IKU Diskominfo sesuai dengan Renstra Diskominfo Tahun 2019-2023.

TABEL 3.13

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2024-2026 DAN REALISASI TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capai Akhir Renstra (2018-2023)	Capaian Kinerja			Keterangan
				2024	2025	2026	
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik /SPBE (smart city)	Poin	3,98	4,59	-	-	Target Akhir RPD Tahun 2026 sebesar 4.00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	90,92	95,89	-	-	Target Akhir RPD Tahun 2026 sebesar 88.60 Nilai

TABEL 3.14

PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2024-2026 DAN REALISASI TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capai Akhir Renstra (2018-2023)	Prosentase Capaian Kinerja			Keterangan
				2024	2025	2026	
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik /SPBE (smart city)	Nilai	118,81%	131,14%	-	-	Target Akhir RPD Tahun 2026 sebesar 4.00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	102,96	108.47%	-	-	Target Akhir RPD Tahun 2026 sebesar 88.60 Nilai

Dari Tabel 3.20 dan Tabel 3.21 terlihat bahwa realisasi indikator pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan target capaian akhir renstra Tahun 2024. Indikator 1, poin pada Tahun 2024 dari target sebesar 3,50 terealisasi penilaian sebesar 4,59 atau 131,14 % (Sangat memuaskan) 2; realisasi kinerja pada Tahun 2024 sebesar 95,89 Nilai dari target sebesar 88,40 Nilai atau 108,47% .

PENILAIAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA BANDUNG



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
NANIK MURWATI
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
NIP. 197208081996032001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
NANIK MURWATI
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas

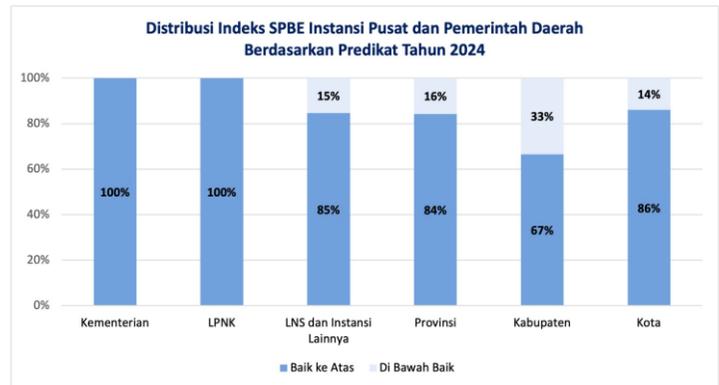


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	5	< 1,8	Kurang
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%			

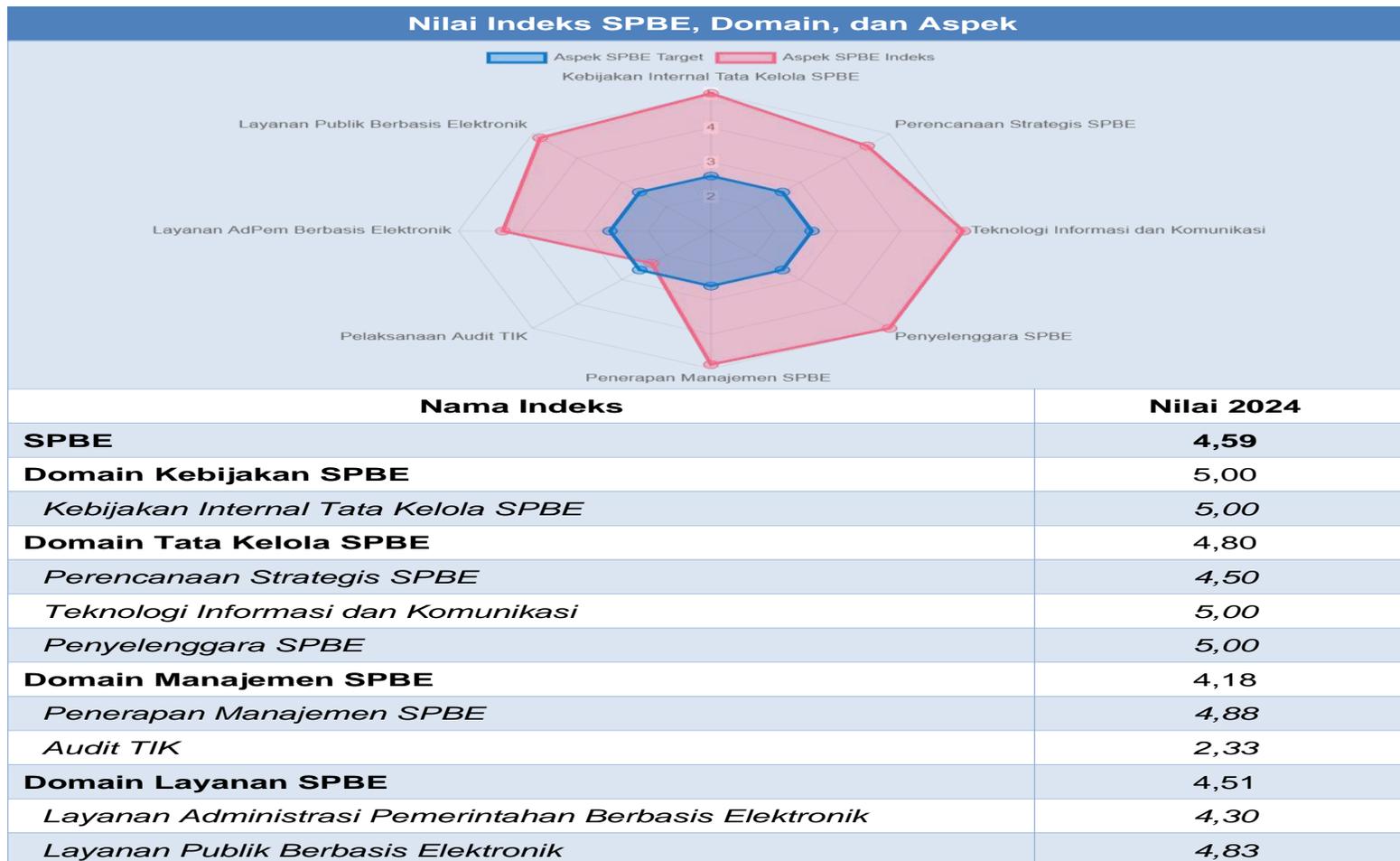
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15



INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA BANDUNG

4,59
(Memuaskan)



Dokumen Rapat Progres Persiapan Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



CAPAIAN SMART CITY KOTA BANDUNG

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika pada tanggal 25 November 2024, Kota Bandung meraih Nilai Smart City tertinggi tingkat Kota/Kabupaten sebesar 3,93.

Berikut 3 besar lingkup tingkat kota dengan nilai Smart City tertinggi diantaranya:

- Kota Bandung (3,93)
- Kota Surabaya (3,82)
- Kota Surakarta (3,81)



**Gerakan Menuju
Kota Cerdas
(Smart City)
2024**

**LAPORAN HASIL EVALUASI TAHAP II
IMPLEMENTASI KOTA CERDAS (SMART CITY)
TAHUN 2024
KOTA BANDUNG**

(SMART CITY) TAHUN 2024



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 | www.kominfo.go.id

Nomor : B-1478/DJAI/AI.01.02/11/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Smart City Tahap II Tahun 2024
untuk 191 Kabupaten/Kota

Jakarta, 25 November 2024

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor: B-1125/DJAI/AI.01.02/09/2024 Tanggal 6 September 2024 tentang Undangan Evaluasi Tahap II Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2024, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan evaluasi *masterplan* dan *quick win smart city*:

1. Dari seratus sembilan puluh satu (191) kota/kabupaten yang terpilih pada Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) periode 2017-2022 terdapat seratus enam puluh lima (165) kota/kabupaten yang mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* melalui tautan smartcity.layanan.go.id dan menghadiri kegiatan evaluasi yang telah diselenggarakan secara daring pada tanggal 29 Oktober – 20 November 2024. Sedangkan terdapat dua puluh enam (26) kota/kabupaten yang tidak mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* dan tidak menghadiri kegiatan evaluasi dimaksud (daftar terlampir);
2. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) pada tujuh puluh lima kota/kabupaten yang terpilih pada periode 2017-2022 dimaksud, berdasarkan lima (5) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni:
 - a. *Baseline* (bobot 10%), menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk menetapkan dokumen *masterplan* kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota, aktivitas dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*, dan realisasi program dan rencana aksi *smart city* di tahun sebelumnya;
 - b. *Output* (bobot 20%), terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program *smart city*, untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, keamanan informasi serta anggaran untuk program *smart city*;

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPR.

- b. Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) merupakan tingkat perbaikan yang terjadi pada tiap daerah setelah mengikuti Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*). Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) diperoleh dengan menghitung selisih antara rata-rata *Baseline*, *Output*, *Outcome*, *Impact*, dan *Quick Win* terhadap nilai tahun lalu.
5. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) dimaksud, dilengkapi dengan masukan dari para asesor yang mendeskripsikan beberapa poin kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk masing-masing kabupaten/kota (sebagaimana terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Ditandatangani secara elektronik
DIREKTUR JENDERAL APLIKASI
INFORMATIKA
Hokky Situngkir

Hokky Situngkir

Tembusan Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
3. Sesditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan ESrE

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
66	KAB. NGANJUK	3,24	3	3,47	3,4	3,6		3,37	-0,01	REGULER
67	KAB. NGAWI	3,92	3,04	3,56	3,33	3,1		3,35	0,26	REGULER
68	KAB. PADANG PARIAMAN	3,76	2,89	3	3,11	3,43		3,16	-0,04	REGULER
69	KAB. PAKPAK BHARAT	3,48	2,25	2,78	3,14	2,48	1,1	2,59	0,33	KPPN IKN
70	KAB. PASER	3,84	3,18	3	3,03	2,8	2,53	3,04	0,2	KPPN IKN
71	KAB. PATI	3,2	2,55	2,9	3,22	2,47		2,84	0	REGULER
72	KAB. PELALAWAN	1,72	1,8	2,15	1,39	1,2		1,7	-0,33	REGULER
73	KAB. PEMALANG	2,4	1,89	2,67	3,1	1,78		2,4	-0,06	REGULER
74	KAB. PENAJAM PASER UTARA	2,44	2	2,61	2,96	2,07		2,43	0,79	REGULER
75	KAB. PONOROGO	2	1,6	1,66	1,21	1,6		1,58	-0,95	REGULER
76	KAB. PROBOLINGGO	3,28	3,02	3,2	3,19	2,12	2,35	2,87	0,41	KPPN IKN
77	KAB. PULAU MOROTAI	2,84	1,65	2,4	3,19	2,45	1,37	2,34	0,07	KPPN IKN
78	KAB. PURWAKARTA	3,48	2,69	3,12	3,4	2,77		3,06	0,1	REGULER
79	KAB. PURWOREJO	2,52	2,53	2,93	3,04	2,42	2,17	2,65	0,4	KPPN IKN
80	KAB. REMBANG	2,8	2,24	2,67	3,04	2,17		2,57	0,23	REGULER
81	KAB. SEMARANG	2,92	2,47	2,62	2,76	2,85	2,03	2,64	0,13	KPPN IKN
82	KAB. SIAK	2,72	2,35	2,78	2,83	3,58		2,86	0,05	REGULER
83	KAB. SIDOARJO	3,28	3,15	3,55	3,48	3,23		3,37	0,36	REGULER
84	KAB. SIMALUNGUN	2,08	1,71	2,15	2,19	1,43	1	1,8	0,32	KPPN IKN
85	KAB. SITUBONDO	3,64	2,76	2,85	3,3	3,48		3,13	0,06	REGULER
86	KAB. SLEMAN	2,92	2,98	3,12	3,24	2,8	2,67	2,99	-0,05	KPPN IKN
87	KAB. SRAGEN	3,96	3,49	3,33	3,47	3,45	3,67	3,51	0,14	KPPN IKN
88	KAB. SUBANG	2,76	2,93	2,95	2,55	2,83		2,82	0,14	REGULER
89	KAB. SUKABUMI	2,88	2,55	2,73	2,7	2,7		2,36	0,51	REGULER
90	KAB. SUKOHARJO	3,92	3,82	3,83	3,74	3,83	3,83	3,69	0,24	KPPN IKN
91	KAB. SUMBAWA	3,56	1,64	2,87	2,7	2,8		2,65	-0,3	REGULER
92	KAB. SUMBAWA BARAT	2,72	2,64	3	3,53	2,75		2,96	0,2	REGULER
93	KAB. SUMENEP	2,24	2,31	3,2	2,75	2		2,6	-0,44	REGULER
94	KAB. TABALONG	3,8	3,55	3,45	3,78	3,33		3,55	0,17	REGULER
95	KAB. TABANAN	3,88	2,96	3,19	3,14	2,93		3,15	0,76	REGULER
96	KAB. TANGERANG	3,8	3,38	3,36	3,11	3,35		3,36	0,01	REGULER
97	KAB. TAPANULI SELATAN	2,08	1,8	2,41	1,95	2,02		2,09	0,19	REGULER
98	KAB. TAPANULI UTARA	2,6	1,58	2,41	2,99	2,15	1	2,19	-0,14	KPPN IKN
99	KAB. TEMANGGUNG	3,92	3,64	3,5	3,91	3,72	3,5	3,7	0,53	KPPN IKN
100	KAB. TOBA	2,96	2,36	2,68	2,96	2,08		2,31	0,14	KPPN IKN
101	KAB. TRENGGALEK	3,92	3,31	3,7	3,23	3,82		3,57	0,15	REGULER
102	KAB. TUBAN	3,8	2,82	3,29	3,77	3,18		3,32	0,59	REGULER
103	KAB. WAKATOBİ	3,88	1	1,18	1	1		0,94	-0,7	KPPN IKN
104	KAB. WONOGIRI	3,96	3,24	3,56	3,44	3,93	3,9	3,62	0,1	KPPN IKN
105	KAB. WONOSOBO	3,36	2,71	3,09	3,1	2,85	1,6	2,85	0,08	KPPN IKN
106	KOTA AMBON	3,8	2,8	2,99	3,3	3,03		3,1	0,23	REGULER
107	KOTA BALIKPAPAN	3,6	3,64	3,21	3,16	3,67	4	3,5	0,09	KPPN IKN
108	KOTA BANDA ACEH	3,36	3,02	3,18	2,89	2,67		3,01	0,61	REGULER
109	KOTA BANDAR LAMPUNG	2,16	1,93	2,5	2,71	2,15		2,32	-0,14	REGULER
110	KOTA BANDUNG	3,92	3,8	3,94	4	3,97		3,93	0,1	REGULER
111	KOTA BANJARBARU	1,92	2,11	2,28	1,2	2,22		1,98	-0,25	REGULER
112	KOTA BANJARMASIN	3,8	3,58	3,5	3,3	3,8		3,57	0,26	REGULER
113	KOTA BATAM	3,88	3,2	3,23	3,04	3,55		3,32	0,97	REGULER
114	KOTA BATU	3,24	2,55	3,04	2,98	2,02	3	2,74	0,47	KPPN IKN
115	KOTA BEKASI	4	3,45	3,56	3,57	3,65		3,6	0,39	REGULER
116	KOTA BINJAI	3	2,51	3,32	2,4	1,93		2,66	0,11	REGULER
117	KOTA BITUNG	3,36	2,98	2,82	2,76	2,52		2,83	-0,07	REGULER
118	KOTA BOGOR	3,76	3,47	3,35	3,49	3,97		3,57	0,22	REGULER
119	KOTA BUKITTINGGI	2,28	2,22	2,06	1,01	2,12		1,92	-0,03	REGULER
120	KOTA CILEGON	1,72	2,18	2,36	2,71	1,73		2,2	-0,11	REGULER
121	KOTA CIMAHİ	3,88	3,24	3,53	3,79	3,88		3,63	0,12	REGULER
122	KOTA CIREBON	4	3,05	3,31	3,23	3,32		3,31	0,36	REGULER
123	KOTA DENPASAR	2,84	2,65	3,53	3,77	3,63		3,35	-0,08	REGULER
124	KOTA DEPOK	3,92	3,31	3,49	3,01	3,73		3,45	0,04	REGULER
125	KOTA DUMAI	3,8	2,76	2,99	3,11	3,82		3,22	0,29	REGULER
126	KOTA JAMBI	3,84	3,18	3,53	3,63	3,35		3,48	0	REGULER
127	KOTA JAYAPURA	1,64	1,49	1,78	2,64	1,63		1,85	0,22	REGULER
128	KOTA KEDIRI	4	3,2	3,27	3,34	3,47		3,38	0,13	REGULER
129	KOTA KUPANG	2,4	2,1	2,73	2,82	1,87		2,42	-0,11	REGULER
130	KOTA MADIUN	4	3,51	3,78	3,97	3,87		3,8	0,09	REGULER
131	KOTA MAGELANG	3,72	3,16	3,41	3,29	3,33	3,1	3,32	0,69	KPPN IKN
132	KOTA MAKASSAR	3,72	3,31	3,67	3,59	3,95		3,64	0,5	REGULER
133	KOTA MALANG	3,76	3,29	3,61	2,7	3,67	2,37	3,27	0,34	KPPN IKN
134	KOTA MANADO	3	2,38	3,03	2,95	2,3		2,74	-0,28	REGULER
135	KOTA MATARAM	3,92	3,38	3,42	3,37	3,53	3,4	3,47	0,26	KPPN IKN
136	KOTA MEDAN	1,56	2,04	2,85	2,76	1,98		2,37	0,6	REGULER
137	KOTA MOJOKERTO	4	3,4	3,65	3,25	3,87		3,6	0,02	REGULER
138	KOTA PADANG	3,56	2,95	3,39	2,81	3,18		3,16	0,09	REGULER
139	KOTA PADANG PANJANG	3,72	2,73	3,15	2,99	2,62		2,99	0,58	REGULER
140	KOTA PALEMBANG	2,2	2,27	3,01	3,1	2,73		2,74	-0,21	REGULER

Text



BAB IV

PENUTUP

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

LKIP adalah gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis 2024-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Sasaran Pertama Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city) dengan target 3,50 Nilai terealisasi 4,59 Nilai (131,14%) atau melebihi dari target yang telah ditentukan.

Sasaran Kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 88,40 poin terealisasi 95,89 Nilai (108,47) atau melebihi target yang ditentukan.

Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang direalisasikan melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan, perlu adanya kesinambungan Program/kegiatan/sub kegiatan dengan didukung dana yang memadai serta fasilitas/sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang memerlukan adanya kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program, kegiatan dan sub kegiatan di masa yang akan datang.

Selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, diupayakan pula adanya program dan kegiatan yang merupakan inovasi baru dalam pengelolaan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistis dan urusan persandian di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang akan diajukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam perencanaan tahun selanjutnya atau Tahun 2025 agar direkomendasikan untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut.

Rekomendasi, saran dan tindak lanjut yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja ditahun mendatang, yaitu;

Rekomendasi

1. Secara prinsip penerapan SPBE melalui implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kota Bandung. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kota Bandung sudah dapat menggambarkan predikat memuaskan dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan
Keunggulan penerapan SPBE terletak pada aspek kebijakan yang sudah terkoordinasi dan didukung oleh perencanaan strategis, aspek TIK, penyelenggaraan, penerapan manajemen, maupun layanan baik yang berbasis administrasi dan publik namun pada aspek audit masih internal, sehingga agar dilakukan audit eksternal pada tahun depan.
2. Perlunya peningkatan layanan dinas terutama pemahaman tugas dan fungsi yang diemban oleh masyarakat.

Saran

1. Perlu adanya dukungan atau komitmen intern perangkat daerah untuk meningkatkan beberapa domain penilaian.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tugas dan pokok diskominfo sesuai dengan peraturan yang ada, karena kewenangan pusat seperti; pelayanan untuk memblokir situs yang bersifat negatif. Pemahaman kepada masyarakat itu ditindaklanjuti dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan internet bersifat bijak kepada sekolah-sekolah maupun kepada orang

tua murid untuk selalu mengawasi anak-anaknya dalam melakukan kegiatan browsing di internet.

Tindaklanjut

1. Dalam rangka peningkatan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 perlu adanya pembagian tugas sesuai dengan indikator penilaian sesuai tugas karena bukan hanya tanggung jawab Diskominfo saja melainkan tanggung jawab semua perangkat daerah lainnya.
2. Memperbaiki system layanan kepada masyarakat terutama layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemahaman melalui sosialisasi di Tahun 2025.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



(YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos.M.Si)
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197311271993031003